

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUATAN MODERASI BERAGAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA AMBON

*Oleh: Ali Litiloly*

Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Ambon

## *Abstrak*

Penelitian ini bertujuan untuk melihat model penguatan moderasi beragama di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Ambon serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses penguatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sedangkan teknis analisis menggunakan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan penguatan moderasi beragama telah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Ambon dengan melibatkan unit kerja dibawahnya, kegiatan penguatan menggunakan empat model yang dalam prosesnya dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai pendukung maupun penghambat. Kesimpulan dari penelitian ini yakni penguatan moderasi beragama dilakukan melalui *pertama* dialog pada forum lintas Agama, *kedua* sosialisasi kepada masyarakat melalui paket materi khutbah atau dakwah/misi, *ketiga* sosialisasi pada kepala madrasah dan guru madrasah, serta *keempat* pembinaan pegawai saat apel pagi setiap awal bulan. Penguatan moderasi beragama dipengaruhi juga oleh faktor pendukung seperti koordinasi, kepemimpinan dan birokrasi serta dukungan masyarakat. Kemudian faktor penghambat yakni kurangnya pengetahuan tentang moderasi beragama dan kurangnya anggaran kegiatan.

*Key Words: Implementasi, Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama,*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kondisi Indonesia yang majemuk khususnya dari aspek agama berpotensi pada menguatnya sentiment keagamaan yang diawali oleh penguatan identitas ideologis. Perilaku umat beragama yang cenderung menonjolkan perbedaan seakan menafikan keberagaman sebagai sebuah keniscayaan, membentangkan jurang terjal atas sebuah hubungan umat beragama. Moderasi beragama merupakan jembatan bagi lahirnya pola hubungan harmonis di kalangan umat beragama di Indonesia, sehingga dibutuhkan strategi penguatan moderasi beragama yang diharapkan dapat menjadikan masyarakat semakin dewasa untuk menerima dan mengakui bahwa perbedaan itu adalah sebuah kemestian yang harus dirawat dengan baik di tengah masyarakat yang majemuk.

Untuk itu pada tanggal 23 Januari 2019 ketika membuka rapat kerja nasional (Rakernas) Kementerian Agama Tahun 2019 di Shangri-la Hotel Jakarta, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menekankan "Penting Moderasi Beragama untuk Kebersamaan Umat". Pilihan Aksi ini juga untuk merespon "Aksi Dukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)" yang digalakkan oleh pemerintah. Pada momentum tersebut Menteri Agama mengajak aparat Kementerian Agama agar mensosialisasikan konsep moderasi beragama kepada masyarakat.

Namun sayangnya, sosialisasi moderasi beragama belum sepenuhnya dilaksanakan oleh aparat Kementerian Agama dari pusat sampai ke daerah, hal ini sebagaimana di sampaikan oleh Lukman Hakim Saefudin sebagai berikut:

“Moderasi beragama belum sepenuhnya dipahami Aparat Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama, apa lagi sampai tingkat diimplementasi dalam program kerja di pusat sampai ke daerah”. Bahkan menurutnya, ada juga yang setengah hati menerima konsep moderasi beragama karena khawatir terkikis keyakinan agamanya. Padahal bersikap moderat tidak memerlukan kompromi untuk mengorbankan keyakinan atas prinsip ajaran pokok agama demi memelihara toleransi dengan umat agama lain.

Selanjutnya pada pengantar buku moderasi beragama (2019:vii), mantan Menteri Agama ini menegaskan agar seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama menjadi pihak terdepan untuk memahami, meyakini dan menginternalisasikan moderasi beragama. Kata Lukman Hakim “Kita harus menjadi penerjemah sekaligus juru kampanye moderasi beragama melalui berbagai program sesuai satuan kerja (satker) masing-masing”.

Berdasarkan alur pikir di atas, maka pada penelitian ini peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan penguatan moderasi beragama di lingkungan Kementerian Agama Kota Ambon. Peneliti memilih Kantor Kementerian Agama Kota Ambon sebagai tempat penelitian, karena penguatan moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial budaya dan politik Kota Ambon-Maluku yang mengalami konflik sejak tahun 1999 sampai tahun 2003. Disamping itu tempat penelitian mudah dijangkau oleh peneliti.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model penguatan moderasi beragama di lingkungan

Kantor Kementerian Agama Kota Ambon?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses penguatan tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui;

1. Model penguatan moderasi beragama di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Ambon berlangsung.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penguatan moderasi beragama.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis untuk meningkatkan pengetahuan peneliti sebagai widyaiswara pengampuh mata diklat moderasi beragama.
2. Dari aspek kelembagaan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Balai Diklat Keagamaan Ambon untuk memprogramkan diklat dalam mendukung penguatan moderasi beragama.
3. Sebagai bahan masukan bagi Kantor Kementerian Agama Kota Ambon untuk lebih memperkuat penguatan moderasi beragama di Kota Ambon.

## **II. LANDASAN TEORI, METODE, TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Landasan Teori**

#### **1. Implementasi Kebijakan**

Wang & Ap (2013: 22) “Implementasi kebijakan merupakan proses di mana ide-ide dan rencana kebijakan diterjemahkan dalam bentuk praktik dan berkaitan dengan pengembangan sistem pengetahuan”. Sedangkan Pradhan (2017: 69) menjelaskan kebijakan itu sendiri digambarkan sebagai kemampuan untuk menerapkan dan kontrol atas masalah yang sedang dibahas dalam wilayah geografis tertentu yang berkaitan dengan kelompok sosial tertentu, instrument, aktor, dan mekanisme untuk keberhasilan operasi”.

Fischer (2018: 27) mengatakan bahwa :

“Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan di mana keefektifannya dapat dilihat ketika menerapkan tindakan kebijakan dengan cara menghubungkan desain kebijakan dan proses implementasi kebijakan itu sendiri. Sebuah kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik apabila menggunakan implementasi yang baik pula. Secara tradisional implementasi kebijakan cenderung bersifat struktural dan kultural artinya kebijakan dapat dilaksanakan secara organisatoris jika terjadi respon dengan perilaku orang individu atau kelompok sosial tertentu. Oleh sebab itu kebijakan di negara-negara demokratis dimana implementasinya membutuhkan stabilitas melalui hukum/nilai sebagai norma, maka dari itu implementasi kebijakan yang sukses dianggap sebagai bentuk keterikatan norma yang ada”.

Ahlers & Schubert (2014:24) mengemukakan Implementasi

kebijakan yang efektif didefinisikan sebagai efektivitas prosedural dan output dari hubungan tiga tingkat yang dimainkan antara; Pertama, kebijakan yang dirancang secara sentral dan mekanisme kontrol kelembagaan yang mempengaruhi semua tingkatan administrasi. Kedua, badan strategis di daerah daerah, terutama di tingkat kabupaten, yang mampu mengimplentasi dengan ketersediaan SDM dan sumberdaya politik. Ketiga, tuntutan publik yang tidak dapat diabaikan dan yang harus diantisipasi dan diakomodasi.

George C. Edward sebagaimana dikutip oleh Subarsono (2011:90-92) berpandangan bahwa:

“Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, artinya keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Kemudian ketersediaan sumberdaya, artinya meskipun isi kebijakan telah dirumuskan dalam bentuk program dan kegiatan yang telah dikomunikasikan secara jelas, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial”.

Dari beberapa pandangan di atas, dapat dikatakan bahwa efektifnya implementasi kebijakan dapat dilihat dari ketika menerapkan tindakan kebijakan dengan cara menghubungkan desain kebijakan dan

proses implementasi kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan menggunakan norma dan mekanisme control secara berjenjang serta membutuhkan komunikasi dan ketersediaan sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial.

## 2. Moderasi Beragama

Pengertian moderasi beragama, dalam KBBI online (2019), terdiri dari dua kata yaitu moderasi dan beragama. Moderasi adalah “Menengahi suatu masalah, pemandu acara atau sering disebut sebagai moderator”. Kata moderasi berasal dari bahasa Inggris ‘*moderation*’ artinya sikap sedang, tidak berlebih-lebihan. Secara umum Definisi moderasi adalah kegiatan untuk mengatur, memandu serta menengahi komunikasi interaktif beberapa pihak baik yang berbentuk lisan ataupun tulis. Sedangkan kata beragama menurut KBBI: yaitu “menganut (memeluk) agama, beribadat; taat kepada agama; baik hidupnya (menurut agama)”.

Secara umum moderasi agama adalah upaya kreatif untuk mengembangkan sikap keragaman dari berbagai ketegangan seperti antara klaim kebenaran mutlak dan subjektivitas, antara radikalisme dan sekularisme (Kawangung, 2019: 163)

Moderasi menurut Lukman Hakim Saepudin (2019:vii) dapat diartikan sebagai membangun komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apa pun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Jadi jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa. sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami dan ikut merasakan satu sama lain yang berbeda dengan kita.

Menurut Faturrahman (2019) secara sederhana moderasi beragama dipahami sebagai sikap dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah (*wasathiyah*), selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam praktik beragama. Jadi, setiap warga masyarakat pemeluk agama, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Untuk masalah-masalah pokok dalam setiap agama, setiap pemeluk agama harus teguh dengan keyakinannya, meyakini kebenarannya dengan mutlak dan fundamental”.

Berdasarkan pandangan di atas, dapat dipahami bahwa moderasi beragama merupakan upaya bersama dalam rangka membangun komitmen mengambil sikap tengah-tengah (*wasathiyah*) dalam beragama, bertindak adil tidak ekstrim kiri maupun kanan atau beragama secara moderat. Sedangkan untuk masalah-masalah pokok dalam setiap agama, setiap pemeluk agama harus teguh dengan keyakinannya, meyakini kebenarannya dengan mutlak dan fundamental, namun tetap saling menghormati tafsir dan praktik beragama dalam mencari titik temu ajaran agama dalam membangun kepentingan bersama dalam kehidupan beragama, bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

## 3. Penguatan Moderasi Beragama

Penguatan moderasi beragama sangat penting untuk dilakukan, Lukman Hakim Saepudin Mantan Menteri Agama RI dalam pidatonya pada Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Tahun 2019, mengatakan bahwa salah satu penguatan moderasi beragama dengan cara “disebarluaskan” bukan pula berarti sekadar meneruskan dan membaginya (*forward and share*) begitu saja tanpa penyaringan dan penyesuaian. Disebarluaskan maksudnya adalah

membumikan substansi moderasi beragama ini dalam sanubari publik melalui kegiatan kultural dan struktural yang produktif dan komunikasi yang efektif. Sehingga dijadikan sebagai cara pandang (perspektif) dalam seluruh praktik dalam kehidupan beragama.

Dalam buku moderasi beragama yang di terbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI (2019:iv), dijelaskan bahwa tujuan penguatan moderasi beragama adalah agar secara terstruktur dijadikan sebagai program nasional, sehingga melekat menjadi cara pandang baik bagi setiap individu maupun lembaga.

Berikutnya tiga strategi utama yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam penguatan dan implementasi moderasi beragama:

“Pertama, Sosialisasi gagasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang moderasi beragama kepada seluruh lapisan masyarakat. Bentuk sosialisasi diarahkan pada apa, mengapa perlu moderasi beragama dan bagaimana cara mengaplikasikan dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, Pelembagaan dan implementasi moderasi beragama, artinya menerjemahkan moderasi beragama kedalam institusi menerjemahkan moderasi beragama ke dalam institusi, lembaga, struktur, atau unit yang secara khusus memikirkan strategi implementasi konsep ini agar mengejawantah menjadi program dan kegiatan yang terukur dan berkesinambungan. Ketiga, Integrasi rumusan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Strategi struktural ini dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat langkah-langkah lain yang selama ini sudah ditempuh, dan semakin

perlu diperkuat, yakni memfasilitasi ruang-ruang perjumpaan antar kelompok masyarakat, untuk memperkuat nilai-nilai inklusif dan toleransi, misalnya dalam bentuk dialog lintas-iman”.

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa penguatan moderasi beragama dapat diimplementasikan baik secara kultural maupun struktural. Secara kultural sosialisasi moderasi beragama dilakukan dengan memperhatikan atau mengakomodir kultur atau budaya masyarakat, sedangkan secara struktural melalui pelembagaan terutama dalam bentuk integrasi ke dalam RPJPN 2020-2024 dan penyusunan renstra Kementerian Agama. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan agar Kementerian Agama membuat program sebagai upaya menciptakan kerukunan, keharmonisan kehidupan sosial, dan menekan konflik agama, sehingga kita menemukan titik temu antar pemeluk agama untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian dan jenis data**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan maksud agar dapat memahami secara mendalam tentang penguatan moderasi beragama pada Kantor Kementerian Agama Kota Ambon. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. (Suyanto, Bagong & Sutinah (2005: 166)

Jenis data berasal dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer artinya data diperoleh langsung dari responden. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari pihak ketiga, majalah, koran, buku dan internet.

## 2. Sumber Informasi (responden/informan)

Informan pada penelitian terdiri dari Kepala Subag Tata Usaha, pelaksana kepegawaian, penyuluh agama pada Kantor Kementerian Agama Kota Ambon serta kepala Madrasah. Informan ini dipilih karena dalam model implementasi kebijakan moderasi beragama di kantor kementerian agama mereka ini yang menjadi subjek pada kegiatan dimaksud

## 3. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kajian literatur. Wawancara dilakukan terhadap (a) Kepala Subag Tata Usaha, (b) 1 orang pelaksana kepegawaian, (c) 2 orang penyuluh agama Islam dan 1 orang penyuluh Agama Kristen serta 1 orang penghulu (d) 2 orang kepala madrasah, untuk mengetahui tentang proses implementasi kebijakan Menteri Agama tentang penguatan moderasi beragama yang dilakukan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Ambon.

## 4. Teknik analisis data

Analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif, yakni data dikumpulkan dan diolah berdasarkan kecenderungannya, diberikan makna kemudian mendeskripsikan atau disajikan dalam bentuk naratif. (Sulipan, 2011 : 35).

## C. Temuan dan Pembahasan

Implementasi kebijakan penguatan moderasi beragama dalam meningkatkan kerukunan umat beragama merupakan tugas Kementerian Agama dari pusat sampai ke daerah. Disamping itu pelaksanaan tugas ini oleh Kantor Kementerian Agama Kota Ambon sangat relevan dengan kondisi sosial politik Kota Ambon. Oleh karena itu upaya

penguatan moderasi perlu dilakukan secara struktural maupun kultural agar proses penguatan dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang baik pula.

Secara struktural dalam rangka pelaksanaan penguatan moderasi beragama dilaksanakan rapat koordinasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Ambon untuk mengkomunikasikan rencana penguatan moderasi beragama dengan para unit kerja. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Subag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Ambon Saraju Kilrey, S.Ag di bawah ini:

“Dalam rangka penguatan Moderasi beragama di lingkungan Kementerian Agama Kota Ambon, telah dilaksanakan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Drs. H Zain Firdaus Kaisupy pada tanggal 10 Juni 2019. Rapat tersebut melibatkan pejabat eselon IV, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kepala Madrasah. Rapat tersebut menyepakati empat model penguatan moderasi beragama di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, *pertama* melalui dialog pada forum lintas Agama, *kedua* sosialisasi kepada masyarakat melalui paket materi khutbah atau dakwah/misi yang dilaksanakan oleh para penyuluh Agama dan penghulu, *ketiga* sosialisasi pada kepala madrasah dan guru madrasah, serta *keempat* melalui pembinaan pegawai yang dilaksanakan setiap bulan saat apel pagi”. (Wawancara, 24 Oktober 2019)

Menurut peneliti, kebijakan Menteri atau Kementerian Agama RI pada prinsipnya telah direspon dengan baik oleh Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, olehnya itu secara organisasi beberapa model penguatan moderasi beragama telah disepakati untuk

dilaksanakan secara kolaboratif yang melibatkan unit kerja dibawahnya. Kegiatan yang diawali dengan rapat koordinasi untuk mengkomunikasikan rencana implementasi menunjukkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kota menjalankan prosedur kebijakan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Relevan dengan pandangan Fischer (2018: 27) yang mengatakan “keefektifan implementasi kebijakan dapat dilihat ketika menerapkan tindakan kebijakan dan menghubungkan antara desain kebijakan dan proses implementasi kebijakan itu sendiri. oleh sebab itu jika sebuah kebijakan dilaksanakan dengan baik apabila menggunakan implementasi yang baik pula”.

Implementasi kebijakan yang baik memerlukan komunikasi yang baik antar komponen-komponen implementator dalam mengatur teknis dan sasaran implementasi, untuk itu secara organisatoris Kantor Kementerian Agama Kota Ambon telah mengatur hal-hal teknis pembagian kerja terkait dengan penguatan moderasi beragama. Pelaksana Kepegawaian Jauhar Saulatu,S.Ag mengatakan bahwa:

“Pada rapat koordinasi telah diatur hal-hal teknis terkait dengan implementasi kebijakan yakni; pembagian kerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. diantaranya kegiatan dialog lintas agama secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum, kemudian kegiatan pembinaan kepala madrasah dan guru dilaksanakan oleh seksi pendidikan Islam. Sedangkan kegiatan pembinaan pada masyarakat dilakukan oleh penyuluh agama plus kepala-Kepala Kantor Urusan Agama serta kegiatan pembinaan pegawai secara umum dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama dan secara bergantian dengan para pejabat

eselon IV” (Wawancara, 25 Oktober 2019).

Secara teoritis komunikasi dengan implementator dalam implementasi kebijakan memiliki pengaruh yang sangat signifikan untuk mencapai keberhasilan. George C. Edward berpandangan “Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, artinya keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan”.

Selanjutnya akan dideskripsikan temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai model penguatan moderasi beragama di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Ambon dan Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penguatan tersebut, kemudian peneliti melakukan analisis sesuai data yang dikumpulkan dan dihubungkan dengan teori di atas.

## **1. Model Penguatan Moderasi Beragama di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Ambon**

### **1.1. Dialog pada forum Lintas Agama**

Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan moderasi beragama adalah dialog antar-umat beragama. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin 09/09 2019 di Ambon. Kegiatan dimaksud melibatkan 50 orang peserta, yang terdiri dari perwakilan dari berbagai kalangan masyarakat dan profesi yang terdiri dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Pada kegiatan dialog lintas agama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, Drs. H Zain Firdaus Kaisupy dalam sambutannya menegaskan bahwa:

“Dialog lintas agama dengan berbagai kalangan masyarakat dan profesi merupakan salah satu upaya dalam membangun kerukunan umat beragama. Kemenag dalam melaksanakan tugas pelayanan memegang tiga mantra yakni yang pertama moderasi beragama, mantra kedua terkait kebersamaan, dan mantra yang ketiga agar pejabat Kemenag mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada umat beragama”.

Lebih jauh Kaisupy mengatakan bahwa:

“... terkait dengan mantra pertama, pada dasarnya semua agama mengajarkan moderasi, Tuhan menurunkan agama melalui Nabi untuk menjaga harkat dan martabat manusia yang harus dilindungi sesuai konteks kemanusiaan. Moderasi beragama adalah mengamalkan pemahaman beragama yang berimbang sesuai dengan ajaran agama tanpa melebih-lebihkan dan atau tanpa mengurangi, artinya menggunakan pemahaman agama yang mengedepankan nilai-nilai kasih sayang, yang dalam agama Islam disebut *Rahmatan Lil’alamin*” (Portal Kemenag, 09 September 2019).

Pandangan Kaisupy sangat relevan dengan teori di atas yang menjelaskan bahwa moderasi beragama menekankan pada sikap dan perilaku yang selalu mengambil posisi tengah-tengah (*wasathiyah*) selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Artinya untuk masalah-masalah pokok dalam setiap agama, setiap pemeluk agama harus teguh dengan keyakinannya, meyakini kebenarannya dengan mutlak dan

fundamental. Pada saat yang sama kesediaan untuk menghormati agama dan keyakinan orang lain, serta menghormati paham keagamaan (tafsir atau pandangan keagamaan inter umat beragama). Karenanya forum lintas agama diharapkan lebih intens melakukan dialog lintas agama dengan memberi penguatan moderasi beragama bagi masing – masing umat beragama. Dialog lintas agama harus menekankan pentingnya moderasi beragama sebagai salah satu agenda strategis dalam rangka menciptakan kerukunan, karena tanpa kerukunan yang terjalin dengan baik maka berbagai program pembangunan bangsa akan menemui jalan buntu. Model penguatan moderasi beragama melalui forum dialog lintas agama sangat relevan dengan kondisi sosial di kota Ambon yang masyarakatnya pernah mengalami konflik keagamaan. Dengan demikian penguatan moderasi beragama secara struktural akan hadir dalam bentuk program pemerintah melalui Kementerian Agama sebagai upaya menciptakan kerukunan dan mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara.

Lebih dari itu moderasi beragama dapat dijadikan sebagai gerakan kultural masyarakat Kota Ambon yang kaya akan kearifan lokal atau budaya damai. Konsekwensinya adalah setiap orang harus memahami hakikat moderasi beragama secara benar dalam rangka hubungan intern maupun antar umat beragama.

## 1.2. Sosialisasi Bagi Masyarakat

Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui paket materi khutbah atau dakwah/misi yang dilaksanakan oleh para penyuluh agama dan penghulu serta pembinaan calon pengantin oleh penghulu.



Hadija Makian, S.Ag penyuluh Agama Islam ketika diwawancarai mengatakan bahwa:

“Pada prinsipnya kami penyuluh Agama Islam sangat mendukung kegiatan penguatan moderasi beragama dengan mempersiapkan konten materi bimbingan dan penyuluhan yang dihubungkan dengan sosialisasi moderasi beragama. Sosialisasi dilakukan pada kelompok binaan di Majelis Taklim dan di lembaga pemasarakatan (Lapas), dengan cara menyisipkan materi moderasi beragama dalam materi rutin bimbingan dan penyuluhan”. (wawancara, 24 Oktober 2019)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Josep Wattimena, S.Si Penyuluh Agama Kristen bahwa:

“Kami sangat mendukung Penguatan moderasi beragama oleh Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, karena itu kami lakukan sosialisasi moderasi beragama dengan cara menghubungkan konsep moderasi beragama dengan materi-materi bimbingan penyuluhan walaupun ada yang tidak tertera secara naratif dalam materi bimbingan” (Wawancara, 24 Oktober 2019 ).

Senada dengan dua penyuluh di atas Fatima Kilwouw, S.Ag menyampaikan bahwa;

“Kami melakukan sosialisasi moderasi beragama di masyarakat tidak langsung menyampaikan konten secara langsung karena masyarakat juga belum paham tentang moderasi beragama. Oleh sebab itu setiap bimbingan dan penyuluhan kami memberikan materi yang mengarah ke moderasi

beragama misalnya: Islam yang marhamah atau Islam yang ramah, bukan Islam yang marah, sebab ada orang yang pahami teks agama secara leterlek sehingga muncul pemikiran etksrem dalam beragama tanpa melihat aspek kontekstual. Kadang mengedepankan klaim kebenaran (*truth claim*) dan menimbulkan perpecahan”. (Wawancara, tanggal 16 April 2020)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Drs. Husen Henan Kepala Kantor KUA Kecamatan Bagula Kota Ambon sebagai berikut ini:

“Sosialisasi tentang moderasi bergama kadang kami masukan dalam materi khutbah jumat, ceramah dan pembinaan calon pengantin, untuk calon pengantin disampaikan sesudah materi terkait dengan kehidupan berumah tangga kemudian kami sisipkan materi moderasi beragama dengan mengajak calon pengantin ikut memelihara kedamaian dalam rumah tangga dan masyarakat. Disamping itu ketika ada kegiatan bersama Pak Camat (Muspika) kami sisipkan juga dengan mensosialisasikan moderasi beragama yang tengah di dorong oleh Kementerian Agama”. (Wawancara, tanggal 15 April 2020)

Pernyataan-pernyataan informan di atas memberikan gambaran bagaimana penyuluh agama dan penghulu memosisikan diri sebagai bentuk kesadaran akan tugas dan fungsi sebagai implementator dalam rangka mengimplementasikan penguatan moderasi beragama bagi masyarakat meskipun penguatan moderasi beragama ini belum disampaikan secara langsung dalam bentuk materi khusus moderasi beragama. Sosialisasi

moderasi beragama kepada masyarakat menjadi sangat penting dikarenakan masyarakat adalah pelaku moderasi beragama itu sendiri.

Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk dan beragam, fungsi dan tugas implementor bukan hanya sekedar menyampaikan apa yang menjadi program dari pemerintah, namun harus benar-benar mengkomunikasikan penguatan moderasi beragama ini dengan pendekatan hati ke hati, dan menjadikan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat menjadi ikatannya. Dengan demikian pendekatan kultural menjadi sangat efektif untuk mensukseskan sosialisasi moderasi beragama ini kepada masyarakat kota Ambon yang begitu multikultur yang pada akhirnya moderasi beragama ini akan lahir dengan sendirinya dari rahim masyarakat sebagai sebuah kesadaran turun temurun yang membudaya.

### **1.3. Sosialisasi Pada Kepala Dan Guru Madrasah.**

Pelaksana kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kota Ambon Jauhar Saulatu,S.Ag mengatakan bahwa:

“Kegiatan di madrasah dilaksanakan setiap ada kunjungan, waktunya tidak menentu biasanya dilakukan setiap 1 atau 2 bulan sekali. Kegiatan ini sosialisasi moderasi beragama di madrasah sarannya untuk kepala madrasah dan guru dengan harapan agar mereka dapat memberikan pencerahan kepada peserta didik agar kelak dapat mengimplementasi moderasi beragama dalam kehidupannya” (Wawancara, 24 Oktober 2019).

Kegiatan sosialisasi tersebut dibenarkan oleh mantan Kepala

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Ambon Koesnadi Hi Umar,M.MPd dan Mantan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ambon Nasit Marasabessy, M.Pd. Menurut Kusnadi:

“Sewaktu masih menjadi kepala Madrasah Tsanawiyah, usai mengikuti kegiatan sosialisasi moderasi beragama dari Kemenag Kota Ambon, selanjutnya dirinya langsung sosialisasikan kepada guru pada momentum rapat evaluasi, agar para guru terus memberikan penguatan terhadap peserta didik”. (Wawancara, 16 April 2020).

Senada dengan Kusnadi, Marasbessy juga menuturkan bahwa:

“Sesudah mengikuti sosialisasi moderasi beragama yang disampaikan oleh Kemenag Kota Ambon, kami terus melakukan penguatan terhadap guru-guru pada setiap rapat di madrasah, dan disaat itu juga kami tekankan kepada guru dan yang lebih khusus lagi kepada guru agama agar dalam menyampaikan materi pelajaran dihubungkan dengan muatan moderasi beragama”. (Wawancara, 17 April 2020).

Menurut peneliti, sosialisasi kepada kepala dan guru madrasah adalah model implementasi moderasi beragama yang sangat penting. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat merekalah orang-orang yang berperan secara langsung menanamkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kebangsaan kepada peserta didik. Sikap demokratis, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjunjung tinggi nilai keagamaan dan menjunjung tinggi nilai kultural dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai konsep moderasi beragama akan

terbentuk dengan baik jika pengetahuan moderasi beragama kontinyu ditularkan dari guru dan kepala madrasah melalui mata pelajaran dan pembinaan-pembinaan di madrasah. Dengan pengetahuan moderasi beragama juga diharapkan peserta didik dapat terhindar dari paham radikalisme dan intoleran seperti yang terjadi pada beberapa sekolah di Indonesia, sebagaimana hasil penelitian Balai Litbang Agama Semarang pada Tahun 2017, selain Balai Litbang Semarang ada juga hasil penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2017) yang menunjukkan bahwa banyak sekolah dan universitas di Indonesia terpapar pengaruh radikalisme dan intoleransi. Maka itu, sudah seharusnya perkembangan paham tersebut patut untuk diwaspadai dengan melakukan usaha-usaha pencegahan (*pereventif*) di madrasah atau sekolah.

#### **1.4. Pembinaan Terhadap Pegawai.**

Kegiatan pembinaan Pegawai ini dilakukan kepada Pegawai dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, menurut Saraju Kilrey :

“Kegiatan pembinaan terhadap pegawai setiap bulan saat apel pagi merupakan kegiatan rutin yang didalamnya ditanamkan kedisiplinan pegawai, namun ketika Kementerian Agama mendorong sosialisasi moderasi beragama maka setiap apel disisipkan juga tentang penguatan moderasi beragama sebagai dorongan untuk menjaga kerukunan yang merupakan tanggungjawab utama setiap ASN Kementerian Agama”. (Wawancara, 24 Oktober 2019).

Pembinaan Pegawai oleh Kantor Kementerian Agama Kota Ambon memiliki relevansi dengan teori di atas terkait dengan “Pelebagaan dan implementasi moderasi beragama”, artinya pembinaan pegawai merupakan salah satu cara untuk menerjemahkan moderasi beragama kedalam institusi lembaga, struktur, atau unit yang secara khusus memikirkan strategi implementasi konsep ini agar mengejawantahkan menjadi program dan kegiatan yang terukur dan berkesinambungan. Oleh sebab itu menurut peneliti dalam penguatan moderasi beragama pada masyarakat, maka aparat sipil negara (ASN) Kementerian Agama di semua lini harus menjadi ujung tombak dalam merawat dan memperkuat moderasi beragama.

Pegawai Kementerian Agama sebagai implementator harus dapat menginternalisasikan nilai-nilai esensial ajaran agama, meneguhkan toleransi, memperkuat komitmen bernegara dan menolak segala jenis kekerasan atas nama agama. Hemat kami, ASN Kementerian Agama di Maluku khususnya Kota Ambon membutuhkan suatu komitmen bersama untuk hal itu. Karena bukan tidak mungkin gesekan-gesekan akibat konflik atau perbedaan pandangan keagamaan atau perbedaan pilihan politik membuatnya cenderung tertutup, selalu mengedepankan fanatisme yang berlebihan sehingga menegasikan orang lain.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan Penguatan Moderasi beragama**

### **a. Faktor Pendukung.**

#### **1). Koordinasi**

Hemat peneliti, dalam sebuah organisasi koordinasi memiliki peran yang sangat penting dan merupakan salah satu faktor pendukung yang

dibutuhkan untuk menggerakkan orang dalam melaksanakan sebuah kebijakan yang terstruktur. Karena pada dasarnya koordinasi merupakan wujud dari kerjasama, menghargai dan menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. E.F.L. Brech sebagaimana dikutip oleh Hasibuan (2007) mengatakan “koordinasi untuk mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri”

Hubungannya dengan Implementasi kebijakan moderasi beragama juga demikian, memerlukan hubungan yang baik antar komponen-komponen yang ada pada lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Ambon termasuk dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lain-lain. Untuk itu, Kantor Kementerian Agama Kota Ambon melalui bagian umum atau seksi terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Jauhar Saulatu, S.Ag bahwa:

“kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mensukseskan sosialisasi moderasi beragama yang sifatnya kedalam secara koordinatif melibatkan bagian-bagian yang ada pada lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Ambon. Sedangkan kegiatan ke luar atau pelibatan umat beragama seperti dialog lintas agama, pembinaan pada majelis-majelis agama atau organisasi keagamaan maupun kelompok-kelompok binaan maka koordinasi keluar dengan para tokoh agama tokoh masyarakat maupun tokoh pemuda baik itu sebagai peserta maupun narasumber tetap dilakukan untuk

mendukung kegiatan dimaksud.” (Wawancara, 25 Oktober 2019).

## 2). Dukungan Kepemimpinan dan Birokrasi

Kepemimpinan dan birokrasi menarik perhatian banyak kalangan, terutama dalam mensukseskan keberhasilan sebuah organisasi. Karena apapun baiknya sebuah program organisasi kalau tidak ditunjang dengan kepemimpinan dan birokrasi yang efektif maka program tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.

Tentang kepemimpinan, Werren Bennis & Burt Nanus, sebagaimana dikutip oleh Daswati (2012) mengatakan bahwa “pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pencapaian tujuan suatu organisasi, karena kepemimpinan adalah inti dari pada manajemen penggerak sumber daya, terutama sumber daya manusia diperlukan untuk kualitas kepemimpinan.

Terkait dengan dukungan terhadap kebijakan penguatan moderasi beragama pada lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Ambon menurut hemat kami para pimpinan yang ada khususnya Kepala Kantornya sangat mendukung kebijakan Menteri Agama. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan dialog maupun beberapa kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan mendapat dukungan dari pimpinan, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Subag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Ambon Saraju Kilrey ketika diwawancarai mengatakan bahwa:

“Para pemimpin disini utamaya Kepala Kantor sangat mendukung sehingga beliau gelar pertemuan untuk mensukseskan kebijakan menteri. Dalam upaya itu Kepala Kantor membuat pertemuan dengan melibatkan komponen terkait sehingga menghasil

keputusan tentang model penguatan moderasi beragama, bahkan saat rapat beliau menyampaikan bahwa kami sangat mendukung dan berusaha sekuat mungkin untuk mensosialisasikan konsep moderasi beragama karena ini menjadi program Kementerian Agama secara Nasional dalam menciptakan kerukunan nasional, khususnya di Kota Ambon”. (Wawancara, 24 Oktober 2019)

Begitu pula dengan faktor birokrasi, secara teoritis Max Weber dalam Kumorotomo: 199;62) seperti yang dikutip oleh M. Fahturrahman (2016) melihat birokrasi sebagai pembagian tugas secara tegas mempekerjakan para ahli-ahli dengan spesialisasi tertentu pada jabatan-jabatan tertentu dan membuat mereka bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas masing-masing secara efektif.

Dari pandangan weber di atas, dapat dikatakan bahwa birokrasi merupakan hierarki dalam implementasi kebijakan publik yang menggambarkan secara rinci tentang tugas, tanggungjawab dan kewajiban suatu jabatan tertentu, apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya dan mengapa pekerjaan tersebut harus dilakukan oleh pelaku implementasi.

Oleh sebab itu pada tatanan ini birokrasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Secara teoritis fungsi birokrasi Kantor Kementerian Agama Kota Ambon dalam mensukseskan implementasi kebijakan penguatan moderasi beragama terlaksana dengan baik. Hal itu terlihat dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan yang diawali dengan rapat koordinasi untuk pembagian kerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Pelaksana Kepegawaian Jauhar Saulatu, S.Ag mengatakan bahwa:

“Untuk hal-hal teknis terkait dengan implementasi kebijakan penguatan moderasi beragama telah dibuat pembagian kerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. diantaranya kegiatan dialog lintas agama secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum, kemudian kegiatan pembinaan kepala madrasah dan guru dilaksanakan oleh seksi pendidikan Islam. Sedangkan kegiatan pembinaan pada masyarakat dilakukan oleh penyuluh agama plus para Kepala Kantor Urusan Agama serta kegiatan pembinaan pegawai secara umum dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama dan secara bergantian dengan para pejabat eselon IV”. (Wawancara, 25 Oktober 2019)

### 3). Dukungan Masyarakat.

Menurut peneliti proses implementasi kebijakan penguatan moderasi beragama sangat kontekstual dengan kondisi Kota Ambon – Provinsi Maluku yang pernah mengalami konflik sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003. Pengalaman konflik tersebut membuat konsep moderasi beragama mudah di terima oleh masyarakat. Drs. Husen Henan Kepala KUA Kecamatan Baguala - Kota Ambon menjeaskan:

“Ketika kami ceramah di masyarakat dan menyampaikan hal yang berhubungan dengan moderasi beragama, masyarakat sangat senang dan tidak ada penolakan, karena masyarakat juga sudah bosan dan tidak mau lagi mengalami konflik yang kedua kalinya, konflik membuat kedua belah pihak sama-sama susah. Untuk itu konsep moderasi beragama sangat relevan dengan

kondisi masyarakat Kota Ambon. Tetapi memang ada juga yang menolak konsep ini karena dianggap tidak tegas dalam beragama. Jadi menurut saya kita juga pahami sosiologi masyarakat sebelum kita lakukan sosialisasi atau ceramah terkait dengan moderasi beragama”. (Wawancara, tanggal 15 April 2020)

Senada dengan informan di atas, menurut peneliti dukungan masyarakat dalam implementasi moderasi beragama merupakan modal sosial orang Maluku khususnya Kota Ambon yang kini mengalami perubahan pasca konflik, perubahan ini dapat dikatakan sebagai humanisme baru yang lebih memberi ruang untuk aktualisasi diri dalam melihat masa depan. Bagi orang Maluku khususnya masyarakat Kota Ambon terbuka kesempatan yang besar untuk belajar dari konflik yang pernah mewarnai sejarah hidup bersama. Dalam konteks ini masyarakat membutuhkan nilai-nilai religiusitas untuk membangun relasi sosial yang dapat menyandarkannya pada kehidupan yang lebih baik.

Oleh karena itu moderasi beragama merupakan salah satu instrumen pengetahuan dan perasaan yang dapat membentuk nilai religiusitas dalam upaya menciptakan keharmonisan antar maupun internal umat beragama di Maluku yang sangat relevan dengan kultur atau nilai adat seperti misalnya pela gandong, potong di kuku rasa di daging dan lain-lain. Konteks inilah yang membuat konsep moderasi beragama dapat diterima oleh masyarakat, walaupun ada yang menolak konsep moderasi beragama itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang konsep moderasi beragama itu sendiri.

## **b. Faktor Penghambat**

### **1). Kurangnya Pengetahuan Tentang Moderasi Beragama**

Penguatan moderasi beragama merupakan sosialisasi gagasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang moderasi beragama kepada seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di Kemenag Kota Ambon harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang konsep moderasi beragama ini karena dia menjadi garda terdepan dalam sosialisasi dimaksud. Namun secara umum pengetahuan ASN tentang konsep moderasi beragama belum memadai. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Khadija Makian S.Ag dibawah ini:

“Pada internal penyuluh agama sangat mendukung hasil rapat dimaksud dengan mempersiapkan konten materi bimbingan yang ada hubungannya dengan sosialisasikan moderasi beragama, tetapi masalah yang dihadapi saat ini penyuluh agama belum memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep moderasi beragama”. (wawancara, 24 Oktober 2019)

Senada dengan Khadija, Fatima Kilwouw, S.Ag juga mengemukakan hal yang sama, menurutnya;

“Secara umum ASN Kemenag Kota Ambon belum semuanya paham tentang konsep moderasi beragama, di penyuluh agama sendiri belum semuanya paham juga, karena kita belum pernah diberikan pemahaman melalui diklat atau forum lain yang dilaksanakan oleh Kemenag Kota Ambon. Kami terkesan jalan sendiri-sendiri dan secara internal belum ada semacam pembekalan untuk penyuluh agama terkait dengan moderasi beragama ini,

padahal kita termasuk garda terdepan untuk melakukan sosialisasi dimaksud.”.

Pernyataan dua informan di atas mengindikasikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kota Ambon terutama penyuluh agama secara umum kurang memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep moderasi beragama. Hal ini disebabkan belum ada pelatihan khusus baik itu melalui jalur pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Kagamaan Ambon maupun forum khusus dalam bentuk bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Ambon.

Pada landasan teori di atas, telah dijelaskan bahwa salah satu strategi utama yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam penguatan dan implementasi moderasi beragama yakni Sosialisasi gagasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang moderasi beragama kepada seluruh lapisan masyarakat. Bentuk sosialisasi diarahkan pada apa, mengapa perlu moderasi beragama dan bagaimana cara mengaplikasikan dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu konsep moderasi beragama ini harus dipahami dengan baik oleh setiap ASN terutama penyuluh Agama. Supaya tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri maka koordinasi dan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Kegamaan Ambon maupun *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan langsung oleh seksi yang membawahi penyuluh agama atau kelompok kerja penyuluh (Pokjaluh), menjadi penting bagi penyuluh agama untuk memiliki pemahaman yang memadai tentang moderasi beragama.

## 2). Kurangnya Anggaran Kegiatan

Adapun faktor utama sebagai penghambat dalam kegiatan penguatan moderasi beragama dilingkungan Kantor Kemenag Kota Ambon adalah anggaran, menurut Saraju Kelrey :

“Kegiatan penguatan moderasi beragama dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi secara intensif melalui forum-forum berskala besar yang melibatkan semua unsur dalam masyarakat, namun kita dibatasi oleh anggaran”. (wawancara, 24 Oktober 2019).

Anggaran tidak dapat dilepas pisahkan dari pengadaan suatu kegiatan baik dalam skala besar maupun kecil. Sosialisasi penguatan moderasi beragama memiliki peran utama dalam setiap kegiatan yang tentu saja membutuhkan anggaran, namun dalam implementasi penganggaran seringkali berbenturan dengan berbagai prosedur maupun regulasi. Untuk mengatasi kekurangan anggaran ini maka sosialisasi yang sifatnya dalam bentuk forum-forum yang berskala besar dapat dikurangi dengan memanfaatkan struktur Kementerian Agama. Untuk itu focus group discussion (FGD) terkait dengan peningkatan pemahaman moderasi beragama dapat diintensifkan pada unit-unit kerja dilingkungan Kementerian Agama Kota Ambon untuk mengatasi masalah penganggaran kegiatan sosialisasi dimaksud.

## III. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan penguatan moderasi beragama telah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Ambon melalui empat model penguatan, *pertama* dialog pada

forum lintas Agama, *kedua* sosialisasi kepada masyarakat melalui paket materi khutbah atau dakwah/misi, *ketiga* sosialisasi pada kepala madrasah dan guru madrasah, serta *keempat* pembinaan pegawai yang dilaksanakan setiap bulan saat apel pagi.

2. Faktor yang mendukung proses implementasi kebijakan penguatan moderasi beragama dilingkungan Kementerian Agama Kota Ambon yakni koordinasi, kepemimpinan dan birokrasi serta dukungan Masyarakat. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya pengetahuan tentang moderasi beragama dan kurangnya anggaran kegiatan

## B. Saran

Berdasarkan ulasan di atas, maka penulis dapat menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada Balai Diklat Keagamaan Ambon untuk terus memprogramkan diklat moderasi beragama guna mendukung kebijakan penguatan moderasi beragama.
2. Kepada Kantor Kementerian Agama Kota Ambon agar dapat melaksanakan focus group discussion (FGD) terkait dengan peningkatan pemahaman moderasi beragama pada unit-unit kerja agar kemudian dapat di sosialisasikan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahlers, A. L., & Schubert, G., (2014), *Effective Policy Implementation in China's Local State*. *Modern China*, 41(4), 372–

405. doi:10.1177/0097700413519563 diakses 24 oktober 2019

Balai Litbang Agama Semarang, (2017), *Moderasi Beragama di Sekolah Melalui Rohis* dalam <https://blasemarang.kemenag.go.id/2019/06/18/moderasi-beragama-di-sekolah-melalui-rohis/>

Daswati, (2012), *Implementasi Peran Kepemimpinan Dengan Gaya Kepemimpinan Menuju Kesuksesan Organisasi* dalam <https://media.neliti.com/.pdf> akses 25 April 2020

Hasibuan, (2007), *definisi-koordinasi-di-dalam-objek* dalam <https://www.materibelajar.id/2016/> diakses 16 april 2020

Kawangung, Y., (2019), *Religious moderation discourse in plurality of social harmony in Indonesia*. *International journal of social sciences and humanities*, 3(1), 160-170. DOI: [10.29332/ijssh.v3n1.277](https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n1.277) di akses 24 oktober 2019

Kementerian Agama, (2019) *Moderasi Beragama*, Jakarta; Badan Litbang dan Diklat

M. Fahturrahman, (2016) *Faktor Birokrasi Dalam Keberhasilan Implementasi KebijakanPublikm*. <https://media.neliti.com/media/publications/.pdf>

Oman Fathurahman. (2019). *Pembangunan Bidang Agama: Penguatan Moderasi Beragama dalam Bernegara*, Jakarta: Kementerian Agama RI

PPIM UIN Jakarta (2017) *Pengaruh Intoleransi dan Radikalisme Menjalar ke Banyak dekolah dan Universitas di Indonesia*, dalam <https://tirto.id/survei-uin-jakarta>, diakses 15 maret 2020



- Pradhan, N. S., Su, Y., Fu, Y., Zhang, L., & Yang, Y. (2017). Analyzing the Effectiveness of Policy Implementation at the Local Level: A Case Study of Management of the 2009–2010 Drought in Yunnan Province, China. *International Journal of Disaster Risk Science*, 8(1), 64–77. doi:10.1007/s13753-017-0118-9 akses 24 oktober 2019
- Portal Kemenag ,(2019), Kemenag Kota Ambon Gelar dialog Lintas Agama dalam <https://maluku.kemenag.go.id/> Akses 24 Oktobrr 2019
- Wang, D., & Ap, J,(2013), Factors affecting tourism policy implementation: A conceptual framework and a case study in China. *Tourism Management*, 36, 221–233. doi:10.1016/j.tourman.2012.11.021 diakses 24 oktober 2019
- Suyanto, Bagong & Sutinah, (2005), *Metode penelitian Sosial: berbagai alternative pendekatan*, Jakarta: Prenada Media
- Sulipan, (2010), *Menyusun Karya Tulis Ilmiah Laporan Penelitian Tindakan Kelas Penelitian Tindakan Sekolah dan Penelitian Eksperimen*. Bandung: Eksismedia Garapindo.
- Subarsono, (2018), Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variable dalam <http://repository.uin-suska.ac.id/13620/7/7.%20BAB%20II%2018119ADN.pdf> diakses 16 april 2020
- Wang, D., & Ap, J, (2013), Factors affecting tourism policy implementation: A conceptual framework and a case study in China. *Tourism Management*, 36, 221–233. doi:10.1016/j.tourman.2012.11.021 diakses 24 oktober 2019